



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT TIM PELAKSANA
TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF INDONESIA**

Hari/ Tanggal : Jum'at, 30 Mei 2014
Waktu : 09.00 – 11.30 WIB
Tempat : R. Serayu, Kemenko Perekonomian Lt.3
Agenda : Rapat Teknis Draft Laporan Minerba 2010 - 2011

Peserta Rapat

Pemerintah :

1. Deputi III Menko Perekonomian : Bambang Adi Winarso, Emy Perdanahari, Budi Utomo
2. Ditjen Perbendaharaan, diwakili : Unggul Budi
3. Ditjen Pajak, diwakili : Dandy Mamunanto, Yudha Hiejaningrat
4. Ditjen Perimbangan Keuangan, diwakili : M. Zainuddin, Irfan Sofi
5. Setjen ESDM, diwakili : M. Atthar Majid
6. Ditjen Minerba, diwakili : Indah Relita
7. Dinas ESDM Jawa Timur, diwakili : Yoyok Suroyo , Yusuf Nitilanto

Perwakilan Industri Mineral dan Batubara

8. PT. Bukit Asam, diwakili : Akbar Prima Bambang
9. PT. Newmont Nusa Tenggara, diwakili : Joko Tirtoprojo
10. PT. Kaltim Prima Coal, diwakili : Rio Supin, Aden Herman
11. PT. Antam, diwakili : Gita Avrilandy

Masyarakat Sipil :

12. PWYP, diwakili : Aryanto Nugroho

Sekretariat EITI :

13. Revenue Specialist, Ambarsari Dwi Cahyani
14. Regulatory Specialist, Ronald Tambunan
15. IT Specialist, Tri Wicaksono
16. Staff : Edityas Nur Hutami, Eka Wahyuni

Rekonsiliator :

17. Myrnie Zachraini, Muhariyanto, Angga Hergunowo, Gemi Ruwanti, Cindy Nur Aini.

Risalah Rapat

Rapat dibuka oleh Ibu Emy Perdanahari selaku sekretaris tim pelaksana transparansi. Rapat dibuka pada pukul 09.00. Agenda rapat kali ini adalah : Status akhir pengumpulan laporan, Perbedaan yang tidak

dapat direkonsiliasi sampai *cut off date* (16 Mei 2014), Rekonsiliasi Royalti & PHT, Rekonsiliasi PPh Badan dan Isu serta Rekomendasi. Presentasi disampaikan oleh Ibu Myrnie dari rekonsiliator.

Rapat teknis kali ini membahas draft laporan Minerba untuk tahun kalender 2010 dan 2011 yang telah disusun dan akan segera diterbitkan pada bulan Juni 2014. Dalam pembahasan, masih terdapat angka-angka yang belum *reconcilled*, biasanya disebabkan oleh kesalahan memasukkan akun, pembayaran dengan bank luar negeri dan kurs dollar, pembayaran di tahun berjalan, dan kelebihan bayar. Dari 83 perusahaan Minerba, ada 11 perusahaan yang belum melapor kepada EITI, kebanyakan perusahaan dari IUP.

Rekonsiliator perlu lebih aktif lagi untuk menghubungi pihak-pihak pemangku kepentingan yaitu Ditjen Minerba, Ditjen Perbendaharaan Negara, Ditjen Pajak, Ditjen Pengelolaan kas negara, dan Ditjen Perimbangan Keuangan untuk melengkapi data-data dalam laporan terutama untuk yang belum *reconcilled* demikian pula sebaliknya pihak-pihak pemangku kepentingan diharapkan mau bekerjasama untuk memberikan data yang dibutuhkan. Karena transparansi adalah kepentingan negara bukan hanya kepentingan 1 instansi atau perorangan.

Perlu pembahasan teknis lebih intensif dalam waktu 1-2 minggu dengan tim pelaksana sampai dengan pengesahan laporan Minerba 2010 – 2011.

Rapat selesai pukul 11.30 WIB.

Catatan:

Risalah rapat ini dilengkapi lampiran sebagai berikut:

1. Materi yang telah dipresentasikan oleh Rekonsiliator